

**LAPORAN PENELITIAN
DOSEN MUDA**



**EVALUASI TINGKAT KOMPETENSI PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Oleh:
IIS PRASETYO, S.Pd., MM
ENTOH TOHANI, S.Pd**

**DIBIYAI DIPA UNY
NOMOR KONTRAK: 018/SP2H/PP/DP2M/III/2008 TANGGAL 6 MARET 2008
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DESEMBER, 2008**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL
PENELITIAN DOSEN MUDA

1. Judul Penelitian:
EVALUASI TINGKAT KOMPETENSI PENGELOLA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2. Kepala Projek Penelitian
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Iis Prasetyo, S.Pd., MM.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 132 310 875
 - d. Pangkat/Gol ruang/NIP : Penata Muda / IIIa / 132 310 875
 - e. Jabatan Sekarang : Asisten Ahli
 - f. Fakultas / Jurusan : Ilmu Pendidikan / Pendidikan Luar Sekolah
3. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang
4. Lokasi Penelitian : Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Jangka waktu : 8 bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 9.700.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY

Dr. Achmad Dardiri
NIP. 130 936 811

Yogyakarta, 22 Desember 2008
Ketua Peneliti,



Iis Prasetyo, S.Pd., MM
NIP. 132 310 875

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Sukardi, Ph.D
NIP. 130 693 813

Ringkasan dan Summary

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi tingkat kompetensi pengelola Pusat Kegiatan Belajar (PKBM), sehingga dengan dapat diketahui tingkat kemampuan pengelola PKBM yang ada saat ini dan dapat diketahui kompetensi apa saja yang belum mereka kuasai serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan kompetensi tersebut. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat berupa standar sebagai acuan bagi perencana program peningkatan kompetensi pengelola PKBM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana dalam metode ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PKBM di DIY, dengan ukuran minimal 10% karena populasi cukup besar yaitu sekitar 528 pengelola dari 176 PKBM di DIY. alat pengumpul data yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah angket (quesioner) disamping alat lainnya seperti observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul melalui angket kemudian di analisis kuantitatif. Unit analisis meliputi rerata kinerja pada setiap kompetensi dasar yang dipertajam dengan mengkaji rerata setiap indikator sehingga diperoleh klasifikasi distribusi nilai berdasarkan standar relatif atau *norm-referenced*, dimana kedudukan seseorang selalu dihubungkan dengan kawan-kawannya dalam kelompok.

Penelitian dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri atas empat kabupaten dan satu kotamadya meliputi: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Jumlah sampel penelitian adalah 100 orang dengan berbagai karakteristik yang bermacam-macam mulai dari jenis pekerjaan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa saat ini pengelola dengan klasifikasi kompetensi tinggi dan rendah yaitu 18% berbanding dengan 38 %, dan dengan klasifikasi sedang berjumlah 44%. Terkait dengan kompetensi teknis, 82% pengelola masuk dalam klasifikasi kompetensi sedang dan rendah sedangkan dengan kompetensi baik hanya berjumlah 18% saja. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini tugas pengelola PKBM tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebagian besar pengelola karena tingkat kompetensi yang kurang baik.

Prakata

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dosen muda tahun 2008 yang berjudul evaluasi tingkat kompetensi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian dosen muda ini.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memfasilitasi peneliti dalam melaksanakan penelitian dosen muda ini.
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kemudahan dan ijin dalam pelaksanaan penelitian.
4. Ketua Jurusan PLS FIP UNY yang telah memberikan kemudahan birokrasi dan kelonggaran bagi peneliti untuk dapat aktif melaksanakan penelitian di lapangan.
5. Rekan-rekan dosen di Jurusan PLS FIP UNY yang telah membantu peneliti dalam melakukan diskusi dan memberi masukan untuk perbaikan penelitian ini.
6. Pengelola PKBM di Propinsi DIY yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai responden penelitian dan membantu kelancaran proses penelitian.

Penulis menyadari dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, karenanya diharapkan masukan serta sarannya agar penelitian ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 Desember 2008

Peneliti

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Ringkasan dan Summary	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
Bab II Kajian Pustaka	6
A. PKBM	6
B. Pengelolaan	9
C. Pengelola PKBM	11
D. Kompetensi Pengelola PKBM	12
E. Evaluasi	16
F. Metode Evaluasi (Penilaian)	18
Bab III Metode Penelitian	20
A. Desain, Lokasi dan Sampel Penelitian.....	20
B. Metode, Teknik, dan Instrumen Pengumpulan Data	21
C. Pencatatan, Pengolahan dan Analisis data	21
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	22
A. Hasil Penelitian	22
1. Deskripsi Lokasi Penelitian	22
2. Karakteristik Responden	23
3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	25
4. Hasil Evaluasi Kompetensi	26
B. Pembahasan	32
C. Keterbatasan Peneiltian	35
Bab V Simpulan dan Saran	36
A. Simpulan	36
B. Saran	36
Daftar Pustaka.....	37
Lampiran	38

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Kompetensi Personal dan Sosial	13
Tabel 2.2. Kompetensi Teknis	14
Tabel 2.3. Kompetensi Akademis	16
Tabel 2.4. Kompetensi Pengembangan Budaya	16
Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	24
Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Kabupaten/Kota	25
Tabel 4.5. Hasil Uji reliabilitas	26
Tabel 4.6. Hasil Evaluasi Kompetensi Personal Sosial	27
Tabel 4.7. Hasil Evaluasi Kompetensi Teknis	28
Tabel 4.8. Hasil Evaluasi Kompetensi Akademis	30
Tabel 4.9. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengembangan Budaya	31
Tabel 4.10. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM	32

Daftar Lampiran

1. Instrumen Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM	39
2. Reliability	44
3. Validity	44
4. Hasil Evaluasi Kompetensi A (Kompetensi Sosial)	46
5. Hasil Evaluasi Kompetensi B (Kompetensi Teknis)	49
6. Hasil Evaluasi Kompetensi C (Kompetensi Akademis)	52
7. Hasil Evaluasi Kompetensi D (kompetensi Pengembangan Budaya)	55
8. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM	58
9. Personalia Tenaga Peneliti	61
10. Berita Acara Seminar Penelitian	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Apabila melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama bagi masyarakat sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai sekolah dasar sekalipun.

Randahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemsikinan dan kebodohan. Tidak jarang masyarakat yang mengalami buta huruf sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan bagi mereka. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Program yang diselenggarakan dalam Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi PAUD, Program kesetaraan Pendidikan Dasar Luar Sekolah, Program Pemberantasan Buta Huruf melalui Keaksaraan Fungsional, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Pendidikan Perempuan, Program Pendidikan Berkelanjutan, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program PLS dari, oleh dan untuk masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur Pendidikan Luar Sekolah adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah yang dikelola oleh lembaga

kemasyarakatan daerah setempat. PKBM merupakan salah satu ujung tombak pengembangan program PLSP ditingkat lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sini diharapkan pengelola PKBM mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dalam melayani dan mengembangkan program pemberdayaan di masyarakat.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan. PKBM hendaknya menjadi pemicu dan penyulut motivasi dan kreasi masyarakat.

Program pendidikan yang ada di masyarakat selama ini bersifat standar, berorientasi akademis, dan kurang bermakna bagi kehidupan sehari-hari, masyarakat hanya menjadi penerima program dan bahkan tidak memiliki akses yang berarti dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian/pengendalian program pendidikan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang kreatif, mandiri dan dinamis dalam mengusahakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lingkungannya.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat, yang merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar masyarakat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan, maka penyelenggara, pengelola dan tenaga pengajar PKBM harus lebih berkualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Seorang pengelola PKBM harus mampu mengakomodasikan seluruh program PLSP di masyarakat dan menjamin jalannya program dengan baik. Namun kondisi yang ada saat ini menunjukkan bahwa keberadaan Pengelola PKBM belum mampu mewujudkan tujuan dari program PLSP yang ada. Pada tataran operasional, masih sangat banyak hasil dari program-program yang ada tidak mencapai standar yang diharapkan, bahkan dapat dikatakan gagal (BPPLSP, 2004:6).

Upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah lama dilakukan, dengan berbagai inovasi program, peningkatan fasilitas dan peningkatan tenaga kependidikan, namun demikian hingga saat ini mutu pendidikan di Indonesia ternyata masih jauh tertinggal dari negara-negara lain. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa variable pendidikan dan latihan merupakan variable yang kecil pengaruhnya (bahkan sebagian tidak berpengaruh) terhadap kinerja tenaga kependidikan, hal ini mungkin disebabkan oleh karena diklat tersebut tidak dirancang sesuai dengan kebutuhan riil peserta di lapangan.

Perlu disadari pula bahwa latar belakang pendidikan pengelola PKBM sangat heterogen, oleh karena itu pelatihan teknis baik sebelum maupun selama melaksanakan tugas sangatlah perlu dilakukan. Berbagai pelatihan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola PKBM, sehingga dari pelatihan ini akan muncul pengelola PKBM dengan kemampuan yang memadai dan mempunyai motivasi dan kemauan kerja yang tinggi. Dengan meningkatnya kualitas seorang pengelola PKBM sudah pasti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program PLSP di masyarakat yang ditangani oleh pengelola PKBM.

Partisipasi lulusan jurusan pendidikan luar sekolah yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan PKBM juga dinilai masih sangat rendah, baik itu partisipasi atas kesadaran sendiri, maupun partisipasi atas dasar pekerjaan atau kewajiban. Kompetensi sebagai pengelola pendidikan luar sekolah seolah tidak berguna ketika mereka lebih memilih untuk berprofesi di luar jalur kePLSan sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak pernah memprioritaskan tenaga kependidikan non formal dalam formasi penerimaan pegawai. Hal ini diperburuk dengan rendahnya pemahaman para pembuat kebijakan mengenai tenaga pendidik dan kependidikan non formal, sehingga rekrutmen pegawai di bidang pendidikan non formal masih banyak yang salah sasaran, dalam arti spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Keberagaman latar belakang pendidikan para pengelola PKBM memungkinkan terjadinya kesenjangan antara kompetensi pengelola yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang sudah dimiliki, mengingat karakteristik pendidikan

non formal memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan formal, dimana pemahaman akan karakteristik masyarakat, model-model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, model pembelajaran masyarakat dan manajemen program pendidikan non formal harus benar-benar dipahami dan dikuasai, sehingga program-program yang ada di PKBM dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Pengelola PKBM selama ini berasal dari lingkungan sekitarnya yang dianggap mampu menjalankan fungsi manajerial di PKBM, tanpa mempersyaratkan kemampuan-kemampuan tertentu harus dimiliki. Banyak para pensiunan PNS atau bahkan guru-guru SD sampai SMA yang terjun menjadi pengelola PKBM dilingkungannya. Kondisi ini disatu sisi memang menguntungkan, dimana pengelola sangat mengenal karakteristik dari warga masyarakat dimana PKBM tersebut didirikan, sehingga program-program bisa sangat sesuai dengan harapan masyarakat. Namun pengelolaan PKBM tidak cukup hanya dengan mengenal karakteristik masyarakat saja, akan tetapi masih banyak lagi yang perlu mereka kuasai supaya PKBM yang mereka kelola dapat berjalan dengan tertib.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Program pendidikan di masyarakat saat ini masih bersifat standar. Berorientasi akademis, dan kurang bermakna bagi kehidupan sehari-hari.
2. Masyarakat hanya jadi penerima program dan tidak memiliki akses yang berarti dalam program yang dilaksanakan.
3. Partisipasi lulusan jurusan PLS yang terlibat dalam pengelolaan PKBM dinilai sangat rendah.
4. Pengelola PKBM memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, menyebabkan terjadinya kesenjangan kompetensi pengelola yang seharusnya dimiliki dengan kompetensi yang sudah dimiliki.

C. Perumusan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah di atas, terungkap bahwa selama ini pengelola PKBM memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, rekrutmen pengelola tidak didasarkan pada kemampuan dan kompetensinya dalam manajemen pendidikan non formal, mahasiswa ataupun lulusan dari jurusan pendidikan luar sekolah tidak didayagunakan dalam pengelolaan PKBM, dan sampai dengan saat ini pengelola PKBM belum mampu mewujudkan tujuan dari program PLSP yang ada, sehingga penelitian ini didesain untuk melakukan evaluasi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh para pengelola PKBM, sehubungan dengan itu, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah tingkat kompetensi pengelola PKBM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Penelitian evaluasi dapat digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut, dimana hakekat penilaian adalah kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Sehingga dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuatan kebijakan untuk menghasilkan strategi-strategi maupun program untuk peningkatan kualitas pengelola PKBM.

D. Tujuan Penelitian

Tingkat kompetensi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat perlu untuk dilakukan evaluasi, sehingga kemampuan pengelola PKBM yang ada saat ini dapat diketahui tingkatannya, dapat diketahui kompetensi apa saja yang belum mereka kuasai dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan kompetensi para pengelola tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi para pengelola PKBM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh hasil evaluasi yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi perencanaan program peningkatan kompetensi para pengelola PKBM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PKBM

Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan tindak lanjut dari gagasan *Community Learning Center* telah dikenal di Indonesia sejak tahun enam puluhan. Secara kelembagaan, perintisannya di Indonesia dengan nama PKBM baru dimulai pada tahun 1998 sejalan dengan upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan (Sudjana, 2003, 2).

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya (BPKB Jatim, 2000, 6).

Keberadaan PKBM memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai koordinasi program-program pembelajaran di masyarakat. Tersedianya pengelola / penyelenggara, tenaga pengajar / tutor yang berkualitas, merupakan daya pikat tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke PKBM. Tujuan PKBM adalah memberdayakan masyarakat untuk kemandirian, melalui program-program yang dilaksanakan di PKBM, agar dapat membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sedangkan fungsi dari PKBM sendiri adalah (Sihombing, 1999:110):

1. *Sebagai wadah pembelajaran*; artinya tempat warga masyarakat dapat menimba ilmu dan memperoleh berbagai jenis keterampilan dan pengetahuan fungsional yang dapat didayagunakan secara cepat dan tepat dalam upaya perbaikan kualitas hidup dan kehidupannya.
2. *Sebagai tempat pusaran semua potensi masyarakat*; artinya PKBM sebagai tempat pertukaran berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, sehingga menjadi suatu sinergi yang dinamis dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

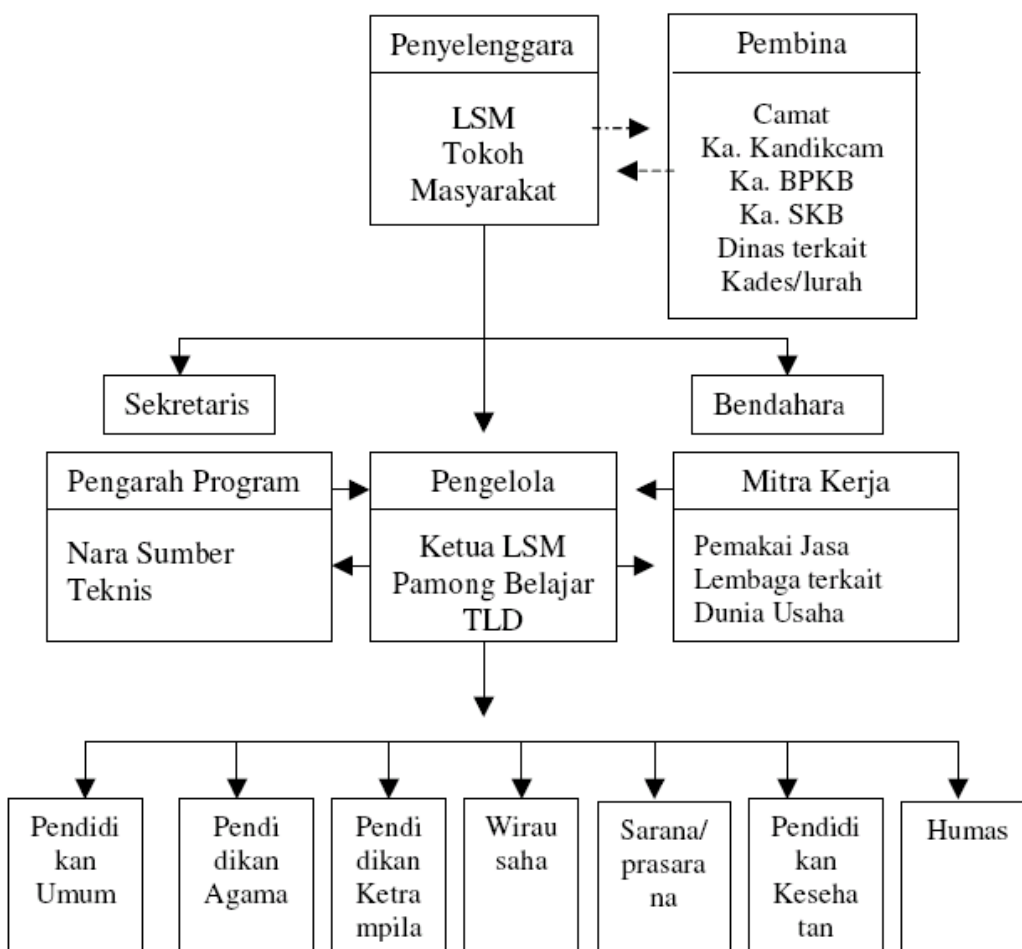
3. *Sebagai pusat dan sumber informasi*; artinya wahana masyarakat menanyakan berbagai informasi tentang berbagai jenis kegiatan pembelajaran dan keterampilan fungsional yang dibutuhkan masyarakat.
4. *Sebagai ajang tukar menukar keterampilan dan pengalaman*; artinya tempat berbagai jenis keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dengan prinsip saling belajar dan membelajarkan melalui diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi.
5. *Sebagai sentra pertemuan antara pengelola dan sumber belajar*; artinya tempat diadakannya berbagai pertemuan para pengelola dan sumber belajar (tutor) baik secara intern maupun dengan PKBM disekitarnya untuk membahas berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PKBM dan pembelajaran masyarakat.
6. *Sebagai lokasi belajar yang tak pernah kering*; artinya tempat yang secara terus menerus digunakan untuk kegiatan belajar bagi masyarakat dalam berbagai bentuk.

Pada prinsipnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan memperhatikan segala potensi yang ada disekitarnya. Oleh karena itu dalam proses pembentukan dan penyelenggaraannya lebih menggunakan metode/pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) yang secara garis besar prinsip-prinsipnya meliputi: belajar dari masyarakat, masyarakat sebagai subyek, saling membelajarkan, pemberdayaan masyarakat, mengenai potensi dan penyadaran, perumusan masalah dan penentuan prioritas, identifikasi pemecahan masalah, pemilihan alternatif pemecahan, perencanaan dan penyajian rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan supervisi, dan evaluasi (BPKB Jatim. 2000. 11). Sebagai bentuk aplikasi prinsip-prinsip PRA tersebut, maka dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pembelajaran di PKBM adalah:

- a. *Pendekatan Terhadap Masyarakat*. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh di desa/kelurahan tersebut, misalnya kiai, ketua RT/RW, lurah/kepala desa, dll. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengakrabkan terhadap

masyarakat dengan program PKBM yang akan diselenggarakan. Dalam pendekatan ini masyarakat diperkenalkan dengan berbagai masalah serta adanya potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang mungkin dapat menunjang pelaksanaan program. Pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk menentukan calon penyelenggara sendiri sesuai dengan yang diharapkan oleh warga masyarakat. Agar tugas penyelenggaraan dalam kegiatan PKBM lebih mudah, maka susunan organisasi penyelenggaraan PKBM adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi PKBM



Sumber: BPKB Jawa Timur, 2000:13

b. *Identifikasi Kebutuhan PKBM.* Identifikasi ini dilakukan oleh calon penyelenggara dan dibantu oleh tokoh masyarakat. Unsur-unsur yang perlu diidentifikasi dalam pelaksanaan PKBM komponen-komponen pembelajaran

yang antara lain meliputi: warga belajar, nara sumber/tutor, sarana belajar, tempat belajar, kelompok belajar, dana belajar, dan program belajar.

- c. *Merumuskan Hasil Identifikasi*. Tujuannya adalah untuk mengetahui prioritas utama yang harus dilakukan oleh penyelenggara bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat sebelum kegiatan pembelajaran PKBM dimulai.
- d. *Pelaksanaan Kegiatan*. Dalam pelaksanaan kegiatan PKBM hendaknya dimusyawarkan lebih dahulu dengan warga belajar untuk menentukan jadwal kegiatan belajar, sehingga pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara partisipatif yang melibatkan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat.
- e. *Evaluasi*. Kegiatan evaluasi PKBM hendaknya dilakukan oleh penyelenggara dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar PKBM. Disamping untuk mengetahui keberadaan PKBM ada hal yang paling penting untuk dibicarakan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang kendala/hambatan yang ditemui selama pelaksanaan PKBM dan sekaligus bagaimana cara pemecahannya (BPKB Jatim. 2000; 21).

B. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan, menurut Hersey dan Blanchard (1982) didefinisikan sebagai berikut: "management as working together with or through people, individual or groups, to accomplish organizational goal" jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerjasama atau melalui orang lain, baik perorangan maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi (Sudjana, 2003:1).

Menurut Winarno Hamiseno, pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Arikunto, 1993:8). Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan

sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Definisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien (Arikunto, 1993:8). Dijelaskan pula bahwa pengelolaan meliputi banyak kegiatan dan semuanya itu bersama-sama menghasilkan suatu hasil akhir yang memberikan informasi bagi penyempurnaan perkegiatan.

Dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan warga belajar mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien maka seluruh sumber daya pendidikan itu perlu dikelola dan digunakan seoptimal mungkin. Sumber daya pendidikan yang berupa manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metode dan sebagainya harus direncanakan, diorganisasi, diarahkan dan diawasi agar tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini dapat dicapai jika fungsi-fungsi pengelolaan dilakukan dengan baik. Adapun fungsi-fungsi pengelolaan itu adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah aktivitas pengambilan keputusan tentang sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran tersebut dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut (Burhanudin, 1994:167). Aspek perencanaan meliputi: apa yang dilakukan, siapa yang harus melakukan, kapan dilakukan, dimana akan dilakukan, bagaimana melakukannya, apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat maksimal.

2. Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah aktivitas menyusun atau membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang yang terlibat dalam kesatuan usaha bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pengorganisasian terdapat adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang terinci menurut bidang-bidang dan batas-batas kewenangannya.

3. Fungsi Pengarahan

Dalam kegiatan pengelolaan, bentuk-bentuk pengarahan yang dapat dilakukan antara lain (Arikunto, 1993:43):

- a. Penjelasan tentang apa, mengapa dan bagaimana tugas;
- b. Urutan prioritas penyelesaian;
- c. Prosedur kerja
- d. Sarana dan sumber yang dapat dimanfaatkan;
- e. Pihak-pihak yang terkait dengan urusannya, baik langsung maupun tidak langsung
- f. Bagaimana melakukan penilaian terhadap penyelesaian tugas tersebut.

4. Fungsi Pengawasan / Kontrol dan Penilaian

Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil dicapai. Menurut Murdick, pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya terdiri dari tiga tahap; 1) menetapkan standar pelaksanaan, 2) pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan 3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana (Fatah, 2000:101).

C. Pengelola PKBM

Pengelola PKBM adalah tenaga kependidikan luar sekolah bukan pegawai negeri yang direkrut untuk mengelola kegiatan operasional program di PKBM mulai dari merencanakan, melaksanakan, membimbing, menilai dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan program-program PLS dilapangan terutama program pendidikan masyarakat (Direktorat Dikmas, 1998).

Tugas pokok seorang pengelola PKBM adalah dalam hal mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merencanakan pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membina pelaksanaan program, melakukan penilaian terhadap program yang berjalan dan melaporkan pelaksanaan program kepada pejabat terkait.

Sebagai tenaga pengelola PKBM, maka secara rinci tugas Pengelola PKBM adalah (BPPLSP, 2004:9):

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dasar.

2. Mengadakan konsolidasi program
3. Menyusun program belajar sesuai kebutuhan belajar masyarakat dan membuat peta program di setiap desa.
4. Menyusun rencana kerja mingguan, bulanan, tengah tahunan dan tahunan.
5. Menyiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan program.
6. Mencarikan dan menyiapkan kebutuhan buku, alat, tenaga / lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
7. Mencatat kemajuan belajar warga belajar.
8. Mengamati dan mencatat pelaksanaan program belajar mengajar.
9. Mengawasi dan mengendalikan semua pelaksanaan program belajar.
10. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan.
11. Memberikan saran-saran perbaikan program atau mengembangkan program belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan situasi daerah.
12. Memilih dan menentukan calon warga belajar untuk setiap jenis program belajar (Paket A, Paket B, Paket C, Kejar Usaha, Beasiswa, Magang, Kursus Diklusemas, dll).
13. Mengadakan rintisan program yang inovatif sesuai dengan potensi, kondisi dan situasi lingkungan sekitar.
14. Mengembangkan jaringan kerja, baik dengan dinas / instansi terkait, dunia usaha dan lembaga keuangan.
15. Mengembangkan usaha produktif sesuai dengan permintaan pasar.

D. Kompetensi Pengelola PKBM

Kompetensi menurut MC. Ashan adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2002). Menurut Art Anderson, kompetensi adalah karakter dasar yang terdiri dari kemampuan (skill), pengetahuan (knowledge) serta atribut personal lainnya yang mampu membedakan seseorang yang perform dan tidak perform.

Secara umum kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, mencakup pengetahuan dan keterampilan atau kecakapan dan sikap, menekankan perilaku yang terukur sebagai aplikasi dari kompetensi yang dimiliki, menekankan pada outcomes. Kompetensi dari pengelola PKBM dijabarkan dari tugas dan pekerjaannya, sehingga kompetensi pengelola PKBM adalah kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya (BPPLSP, 2004:11).

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengelola PKBM adalah:

1. Kompetensi Personal Sosial
2. Kompetensi Teknis
3. Kompetensi Akademis
4. Kompetensi Pengembangan Budaya

Berikut ini adalah disajikan tabel kompetensi pengelola PKBM (BPPLSP, 2004;13-18).

Tabel 2.1. Kompetensi Personal Sosial

No	Kompetensi	Kompetensi dasar	Indikator Kompetensi
	Mampu menerapkan nilai-nilai hidup dalam kehidupan	a. Memiliki nilai-nilai hidup	a. Memiliki kedisiplinan b. Memiliki rasa tanggung jawab c. Suka bekerja keras d. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi e. Memiliki sikap kemandirian f. Memiliki kejujuran
		b. Aspek sikap terhadap kelompok sasaran	a. Menghargai perbedaan kemampuan dan pendapat warga belajar b. Menghargai pengalaman kelompok sasaran c. Dapat memahami kondisi social ekonomi kelompok sasaran d. Dapat memahami kondisi fisik kelompok sasaran
		c. Aspek komunikasi personal	a. Mampu berkomunikasi verbal b. Mampu mendengar pesan komunikasi c. Mampu memahami pesan d. Mampu menginterpretasikan pesan e. Mampu menyampaikan pesan

		d. Aspek hubungan/ kerja sama / sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan atasan b. Memiliki jiwa tenggang rasa c. Dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat d. Dapat bekerjasama dengan instansi terkait dan organisasi lintas sektoral
--	--	--	---

Tabel 2.2. Kompetensi Teknis

No	Kompetensi	Kompetensi dasar	Indikator Kompetensi
1.	Mampu mengembangkan program PLS	a. Mampu merencanakan program PLS	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat b. Mampu menganalisis dan menentukan skala prioritas kebutuhan c. Mampu mengidentifikasi potensi lingkungan d. Mampu menyusun data dasar program PKBM e. Mampu menyusun rencana program PKBM f. Mampu menyusun desain/ proposal program PKBM
		b. Mampu memotivasi kelompok	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu memotivasi masyarakat agar terlibat dalam program PKBM. b. Mampu mengembangkan iklim kerja yang kondusif
		c. Mampu mengorganisasi program	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menyusun struktur organisasi b. Mampu membagi tugas dan tanggung jawab c. Mampu mendelegasikan tugas-tugas khusus d. Mampu melibatkan masyarakat dalam rekrutmen kelompok sasaran e. Mampu memberdayakan seluruh potensi untuk kepentingan program f. Mampu mendinamisasikan dan melestarikan kegiatan dan program PKBM

2	Kemampuan melakukan pembinaan	a. Mampu melaksanakan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu memberikan masukan (umpan balik) b. Mampu melakukan pembinaan kepada tutor c. Mampu memberikan pembinaan dalam pengelolaan keuangan
3.	Mampu melakukan penilaian	a. Mampu melaksanakan penilaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menyusun rencana penilaian program b. Mampu menyusun instrument penilaian program c. Mampu melaksanakan penilaian program d. Mampu menganalisis hasil penilaian e. Mampu menyusun laporan hasil penilaian program f. Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk mengembangkan program
4.	Kemampuan melakukan kegiatan administrasi	a. Kemampuan dalam membuat laporan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu melaporkan secara lisan dan tertulis tentang perkembangan program kepada pihak yang membutuhkan. b. Mampu melaporkan secara lisan dan tertulis tentang proses, dapat melakukan penyelenggaraan seluruh program kepada pihak yang membutuhkan pengumpulan data dasar,
		b. Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menganalisis peluang b. Mampu memanfaatkan peluang c. Mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar d. Mampu mengidentifikasi tempat atau pemasaran e. Mampu mempromosikan produk
		c. Ketatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu membuat administrasi/pembukuan b. Mampu membuat laporan akuntabilitas kepada masyarakat

Tabel 2.3. Kompetensi Akademis

No	Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi
1.	Memiliki pendidikan dan penguasaan keahlian	Memiliki pemahaman penguasaan konsep dasar PLS	<ul style="list-style-type: none"> a. Memahami program-program pendidikan luar sekolah (PLS) b. Memahami program-program kepemudaan c. Memahami program-program PAUD d. Memahami program-program kemasyarakatan e. Memiliki minimal satu keterampilan/ keahlian tertentu yang dapat ditularkan dan dikembangkan kepada masyarakat. f. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep dasar PLS g. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pembelajaran orang dewasa h. Memiliki pemahaman yang baik tentang konsep pendidikan seumur hidup i. Memiliki pemahaman yang baik tentang satuan-satuan PLS.

Tabel 2.4. Kompetensi Pengembangan Budaya

No	Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Kompetensi
1.	Mampu mengembangkan wawasan budaya	Memahami budaya masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat memahami nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di wilayah kerjanya. b. Dapat memahami adat istiadat yang berlaku di masyarakat c. Dapat memahami bahasa sehari-hari yang dipakai masyarakat di wilayah kerjanya. d. Dapat memanfaatkan masyarakat dalam melaksanakan program.

E. Evaluasi

Worthen dan Sanders (1973) memberi arti evaluasi sebagai berikut: *“evaluation as s process of identifying and collecting information to assist decision-makers in*

choosing among available decision alternatives”, dalam pengertian ini dikemukakan bahwa penilaian atau evaluasi merupakan proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternative keputusan. Alkin (1981) mengemukakan bahwa “evaluation is the process of accertaining the decisioan areas of concern, selecting appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report summary data useful to decision makers in selecting among alternatives (Sudjana, 2003:266).

Berdasarkan pengertian di atas, maka penilaian adalah sebagai kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data atau infomasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Batasan ini mengandung tiga unsur penting yaitu kegiatan sistematis, data atau informasi, dan pengambilan keputusan. Kegiatan sistematis ini mengandung makna bahwa penilaian itu dilakukan melalui prosedur tertentu yang tertib, data atau informasi yang dikumpulkan sebagai fokus kegiatan penilaian, diperoleh melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dengan menggunakan metode dan teknik ilmiah. Pengambilan keputusan menekankan bahwa data atau informasi yang disajikan itu akan bernilai guna apabila menjadi masukan berharga untuk proses pengambilan keputusan tentang alternatif yang akan diambil. Dengan demikian penilaian merupakan kegiatan yang teratur untuk memperoleh data yang berguna bagi pengambilan keputusan.

Pengertian sebagaimana yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa penilaian memiliki kaitan atau berdekatan dengan penelitian. Penilaian dan penelitian memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah; pertama, bahwa penilaian dan penelitian merupakan kegiatan yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data atau informasi dari sumber-sumber secara objektif. Kedua, penilaian dan penelitian pada dasarnya ialah penerapan fungsi ilmu pengetahuan yaitu untuk memahami (*to perceive*), menjelaskan (*to explain*), meramalkan (*to predict*), dan mengendalikan (*to control*) suatu gejala atau fenomena. Ketiga, kegiatan penilaian dan penelitian memerlukan metode dan teknik ilmiah untuk menyusun rancangan (*design*), pengukuran, analisis, dan pembahasan hasil. Keempat, keduanya menggunakan asas-asas ilmiah yaitu obyektif atau setia pada kenyataan,

datanya dapat diobservasi, alat ukurnya ajeg dan dapat dipercaya, serta hasilnya memiliki nilai guna. Kelima, penilaian dan penelitian dapat menggunakan pendekatan dektif dan induktif. Keenam, kegiatan penilaian dan penelitian, dalam hal tertentu, dapat digabungkan yang dikenal dengan istilah penelitian evaluasi (*evaluation research*) (Sudjana, 2000:268).

F. Metode Evaluasi (Penilaian)

Secara umum penilai terbagi kedalam dua kategori yaitu penilai yang berorientasi pada metode dan penilai yang berorientasi pada masalah. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk penilaian antara lain (Sudjana, 2000:285)

1. Studi Eksperimen dan Eksperimen Semu

Studi eksperimen penting digunakan jika penilai ingin mencari jawaban beragam terhadap pertanyaan tentang efektivitas program atau komponen. Studi eksperimen tidak digunakan untuk menilai peristiwa masa lampau.

2. Metode Korelasi

Secara umum, korelasi antara status kurang dikenal dalam evaluasi program. Salah satu sebabnya adalah bahwa para evaluator lebih banyak diminta untuk melakukan studi korelasi sederhana. Penggunaan metode korelasi dapat digunakan dalam berbagai situasi yang bermanfaat untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang program pendidikan. Korelasi antara biaya pendidikan dan efektivitas program yang diketahui melalui studi lintas program atau dimensi-dimensi program, mungkin bermanfaat bagi pengambil keputusan tentang keberlanjutan atau modifikasi program.

3. Metode Survey

Metode survey dapat digunakan untuk menjajagi, mengumpulkan, menggambarkan, menerangkan sasaran atau objek yang dievaluasi. Dalam menjajagi, mengumpulkan dan menggambarkan, metode ini berguna untuk mengungkap situasi atau peristiwa dari akumulasi data deskriptif. Metode ini tidak mengharuskan untuk selalu mencari atau menjelaskan hubungan-hubungan, mentes hipotesis, membuat prediksi, atau mencari makna dan

implikasi. Survey mungkin menjadi metode yang terbaik bagi para pakar-pakar ilmu social yang berminat dalam pengumpulan data secara langsung untuk menggambarkan populasi besar. Metode ini pun sangat cocok untuk mengungkap sikap dan orientasi populasi yang besar jumlahnya.

4. Studi Kasus

Studi kasus dikatakan sebagai analisis dan deskripsi secara mendalam serta terinci tentang suatu organisasi, lembaga, atau fenomena dalam konteks lingkungannya (Anderson, 1975). Studi kasus sangat berguna untuk mengembangkan hipotesis yang dapat mengarahkan pada penilaian dalam skala lebih besar dan untuk menghimpun saran-saran mengenai berbagai variable dan alat pengukuran yang akan digunakan dalam penilaian yang berskala lebih besar.

5. Pengamatan Informal

Beberapa buku literature mengungkap bahwa penilaian pada dasarnya diangkat dari kesaksian. Kesaksian adalah induk dari berbagai perencanaan dan evaluasi program. Seperti dalam program-program pemerintah baik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya, kadang-kadang kesaksian didahului oleh pengamatan informal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain, Lokasi dan Sampel Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Travers, 1978 dalam Husein, 1999). Metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses riset (Gay, 1976 dalam Husein, 1999). Penelitian deskriptif memiliki bermacam-macam tujuan penelitian: 1) *description of phenomena or characteristic associated with a subject population*, 2) *estimate of the proportions of population that have these characteristic*, 3) *discovery of associations among different variables* (Cooper & Schindler, 2003:161).

Metode penelitian ini dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga dapat memberikan lebih banyak manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula diterapkan pada berbagai macam masalah. Penelitian ini akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya, antara lain: Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola PKBM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ukuran minimal sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut (Gay dalam Husein, 1999):

- a. Metode deskriptif minimal 10% populasi, untuk populasi relatif kecil minimal 20% populasi.
- b. Metode deskriptif-korelasional, minimal 30% subjek.
- c. Metode ex post facto minimal 15 subjek per kelompok.
- d. Metode eksperimental, minimal 15 subjek per kelompok.

Dari batasan di atas dimana penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah minimal 10% dari jumlah populasi

yang ada. Sampel merupakan pengelola PKBM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota yang akan dipilih dengan menggunakan simple random sampling, setiap kabupaten dan kota akan diwakili oleh minimal 4 PKBM dimana setiap PKBM dimana setiap PKBM akan diwakili oleh beberapa pengelola hingga persyaratan minimal 10% sampel terpenuhi dari sekitar 528 pengelola dari 176 PKBM di DIY.

B. Metode, Teknik, dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi dan angket. Observasi akan dilakukan pada kegiatan yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mencari informasi berupa penelusuran dokumen seperti buku laporan, publikasi dan pengumuman. Angket adalah alat pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.

C. Pencatatan, Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil pengamatan, dokumentasi dan angket akan dianalisis. Pengukuran kompetensi akan dilakukan dengan teknik penilaian oleh atasan, dimana ketua pengelola PKBM akan menilai kompetensi karyawannya dengan cara memberikan penilaian diri terhadap setiap butir instrumen yang disajikan. Untuk mengetahui tingkat kompetensi dari pengelola PKBM, akan digunakan skala inventory test dengan 4 opsi. Instrumen ini disesuaikan dengan teknik pengukuran dimana pengelola PKBM sebagai objek sekaligus subjek pengukuran dengan cara memberikan penilaian kemampuannya pada rentang skor 1 sampai 4, yang artinya kemampuan terendah diberi skor 1 dan kemampuan tertinggi diberi skor 4 (BPPLSP, 2004:19).

Untuk menentukan tingkat kemampuan pengelola PKBM berdasarkan kompetensi yang dikembangkan maka data hasil pengukuran kompetensi pengelola PKBM akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan rerata capaian kinerja pada masing-masing kompetensi. Unit analisis meliputi rerata kinerja pada setiap kompetensi dasar yang dipertajam dengan mengkaji rerata setiap indikator (BPPLSP, 2004:20), dengan standar relatif atau *norm-referenced*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat kompetensi para pengelola PKBM di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui tingkat kesejangan antara kompetensi yang seharusnya mereka kuasai dengan kompetensi yang telah mereka kuasai.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, di bawah ini akan digambarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Propinsi DIY berada pada peringkat ke 3 IPM dengan skor 70,8. Rata-rata usia harapan hidup penduduk 72,4 tahun. Persentase angka melek huruf dewasa adalah 85,9%. Rata-rata lama sekolah 8,1 tahun. Pengeluaran per kapita Rp 611,300,00. Dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index*) tahun 2002, Propinsi DIY berada pada peringkat ke-2 dengan skor 65.2. Rata-rata usia harapan hidup penduduk perempuan adalah 74,2 tahun, laki-laki 70,4 tahun. Persentase angka melek huruf untuk perempuan 77,5%, laki-laki 90,4%. Rata-rata tahun sekolah untuk perempuan 7,3 tahun dan laki-laki 9,0 tahun. Persentase proporsi tenaga kerja untuk perempuan adalah 44,4% dan laki-laki adalah 55,6%.

Ukuran pemberdayaan perempuan (*Gender Empowerment Measure*) menunjukkan bahwa Propinsi DIY berada pada peringkat ke-4 dengan skor 56,1. Persentase perempuan berada di parlemen adalah 9,1%, perempuan di posisi kepala, staff manajemen dan teknis adalah 37,4%, dan persentase tenaga kerja perempuan adalah 44,4%. Sementara itu, Indeks Kemiskinan Penduduk (*Human Poverty Index*) tahun 2002 menunjukkan bahwa Propinsi DIY berada pada peringkat ke 6 dengan skor 21,0. Usia harapan hidup penduduk sampai 40 tahun adalah 6,7%, persentase penduduk melek huruf 14,1%, penduduk tanpa akses air bersih 38,9%, penduduk

tanpa akses fasilitas kesehatan 7,7 %, dan penduduk di bawah 5 tahun kurang makan adalah 16,9%.

Berdasarkan kabupaten, Kabupaten Sleman menempati urutan ke-30 untuk Indek Pembangunan Manusia dengan angka harapan hidup mencapai 72,6 tahun, angka melek aksara orang dewasa 88,6 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 9,7 tahun. Kabupaten Bantul menempati urutan ke-94 dengan angka harapan hidup mencapai 70,4 tahun, angka melek aksara orang dewasa 83,4 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 7,6 tahun. Kabupaten Kulonprogo menempati urutan ke-76, dimana angka harapan hidup mencapai 72,6 tahun, angka melek aksara orang dewasa 83,1 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 7,3 tahun. Kabupaten Gunung Kidul menempati urutan ke-140 dengan angka harapan hidup 70,3 tahun, angka melek aksara orang dewasa 83,4 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 7,3 tahun. Kota Yogyakarta menempati urutan ke-3 dengan angka harapan hidup mencapai 72,9 tahun, angka melek aksara dewasa 94,9 % dan rata-rata waktu sekolah adalah 10,7 tahun.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kota Yogyakarta menempati posisi yang lebih baik dibandingkan dengan lainnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menempati peringkat ke-3 nasional dalam Indek Pembangunan Manusia, disusun kemudian Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

2. Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: status pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan serta distribusi responden berdasarkan kabupaten atau kota. Tingkat pendidikan dikategorikan menjadi empat yaitu pendidikan SLTP, SLTA (SMA, SMK, SPG), Diploma (D2 dan D3), Mahasiswa, S1 dan pendidikan S2. Tabel karakteristik reponden berdasarkan status pekerjaan ditunjukkan dengan tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	25
2	Petani	4
3	Swasta	38
4	Guru	30
5	Pensiunan	3

Sumber: data penelitian diolah

Dari data di atas terlihat bahwa dari sampel yang diambil sebanyak 100 orang, diketahui bahwa sebagian besar pengelola PKBM berstatus pekerjaan swasta, guru dan pegawai negeri sipil, sedangkan bagian kecilnya adalah petani dan pensiunan. Berikutnya adalah data responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	53
2	Perempuan	47

Sumber: data penelitian di olah.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang dijadikan sebagai sampel penelitian menunjukkan angka yang hampir sama yaitu laki-laki 53 orang (53 %) dan perempuan 47 orang atau (47 %). Berikutnya data responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	3
2	SMA	16
3	SMK	4
4	SPG	5
5	D2	9
6	D3	8
7	Mahasiswa	1
8	S1	49
9	S2	5

Sumber: data penelitian diolah.

Jumlah responden pengelola PKBM dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 49 ditambah 1 berstatus mahasiswa sehingga berjumlah 50 orang (50 %) lebih banyak dari yang lain. Responden dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 25 orang (25%), dengan pendidikan diploma (D2 dan D3) berjumlah 17 orang (17%), pengelola dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 5 orang (5%) dan SLTP berjumlah 3 orang (3%). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, seharusnya kemampuan akademis pengelola PKBM dapat dikatakan baik dan sebagian besar sudah memenuhi persyaratan sebagai pengelola. Akan tetapi jika dikaitkan dengan kompetensi sebagai pengelola belum bisa dipastikan, mengingat keberagaman latar belakang program studi atau jurusan non jurusan pendidikan luar sekolah yang mereka peroleh.

Berikutnya adalah distribusi responden berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan dalam tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Sleman	25
2	Bantul	16
3	Kulonprogo	27
4	Gunung Kidul	27
5	Kota Yogyakarta	5

Sumber: data penelitian diolah.

Dari tabel di atas dapat dilihat responden dari setiap kabupaten/kota kecuali Kabupaten Bantul 16 orang dan Kota Yogyakarta 5 orang memiliki jumlah yang hampir sama yaitu 25 dan 27 orang.

3. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan melakukan uji coba instrumen terhadap 30 orang responden pengelola PKBM di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Uji validitas yaitu pengujian terhadap kualitas item-item. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor tiap butir (X) dengan skor total (Y) yang merupakan jumlah tiap skor, yang menggunakan rumus korelasi pearson product

moment. Syarat minimum untuk dianggap valid apabila $r > 0,361$ (Sugiyono, 2008). Dari hasil analisis melalui perhitungan SPSS 15 for windows, diketahui dari 64 item kuesioner, yang memenuhi syarat validitas berjumlah 54 item sedangkan 10 lainnya tidak valid dan direduksi. Adapun item yang direduksi antara lain: item nomer 5, 9, 10, 33, 34, 45, 47, 48, 49, dan 63.

Instrumen yang reliabel adalah instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya. Instrumen yang reliabel akan dapat menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Reliabilitas ditetapkan dengan melihat nilai Alpha Cronbach. Alat pengukuran dianggap reliabel jika nilai Alpha $> 0,5$. Hasil Alpha Cronbach pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items	Keterangan
,961	,962	54	Reliabel

Sumber; data penelitian diolah

4. Hasil Evaluasi Kompetensi

Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi pengelola PKBM yang terdiri dari empat kompetensi utama yaitu: 1) kompetensi personal sosial, 2) kompetensi teknis, 3) kompetensi akademis dan 4) kompetensi pengembangan budaya.

a. Hasil Evaluasi Kompetensi Personal Sosial

Kompetensi Personal Sosial pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) memiliki nilai-nilai hidup, 2) aspek sikap terhadap kelompok sasaran, 3) aspek komunikasi personal, 4) aspek hubungan/ kerja sama/ sosial. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std Dev	4,85	
mean	51,49	
Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	59,98
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	57,55
Baik	Mean + 0,75 S.D	55,13
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	52,70
Cukup	Mean - 0,25 S.D	50,28
Kurang	Mean - 0,75 S.D	47,85
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	45,43
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	43,00

Hasil perhitungan standar deviasi dan rata-rata skor nilai responden, kemudian dibandingkan dengan skor nilai masing-masing responden berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di Propinsi DIY. Hasil evaluasi ditunjukkan oleh tabel 4.6.

Tabel 4.6. Hasil Evaluasi Kompetensi Personal Sosial

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman	1	1	1	5	2	5	2	8	25
Bantul	1		2	5	2	4	2		16
Kulon Progo	2	1	4	4	3	7	5	1	27
Gunung Kidul	1	2	6	6	6	6			27
Kota Yogyakarta		2				3			5
Jumlah	5	6	13	20	13	25	9	9	100

Sumber: data penelitian diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa 25% responden menunjukkan tingkat kompetensi personal sosial Kurang, 20% Lebih Dari Cukup, 13 % Cukup, 9% Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali, 6% Baik Sekali dan 5% Sangat Baik Sekali. Artinya hanya 24% pengelola PKBM yang masuk kategori baik sampai baik sekali, sedangkan sisanya sebanyak 76% belum sesuai dengan harapan. Kondisi ini menunjukkan masih sangat lemahnya penguasaan kompetensi personal sosial dari pengelola PKBM yang merupakan aspek kompetensi yang cukup penting terkait dengan nilai-nilai hidup, sikap pengelola terhadap kelompok sasaran, komunikasi yang baik antara pengelola dengan warga belajar ataupun dengan warga masyarakat dan hubungan pengelola dengan masyarakat dalam kerjasama dan kegiatan sosial. Aspek ini tentu saja sangat penting karena kelancaran program di masyarakat menuntut kompetensi personal

yang baik dari pengelola agar program yang dilaksanakan di PKBM dapat berjalan dengan lancar.

b. Hasil Evaluasi Kompetensi Teknis

Kompetensi Teknis pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) mampu merencanakan program PLS, 2) mampu memotivasi kelompok, 3) mampu mengorganisasi program, 4) mampu melaksanakan pembinaan, 5) mampu melaksanakan penilaian, 6) kemampuan dalam membuat laporan, 7) kewirausahaan, 8) ketatausahaan. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std Dev 8,18
mean 77,97

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	92,29
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	88,20
Baik	Mean + 0,75 S.D	84,11
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	80,02
Cukup	Mean - 0,25 S.D	75,93
Kurang	Mean - 0,75 S.D	71,84
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	67,75
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	63,66

Tabel 4.7. Hasil Evaluasi Kompetensi Teknis

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman	1		2	3	3	2	5	9	25
Bantul	1		2	8	2	1	2		16
Kulon Progo	1	1	4		13	3	3	2	27
Gunung Kidul	3		3	4	14	2	1		27
Kota Yogyakarta					4	1			5
Jumlah	6	1	11	15	36	9	11	11	100

Sumber: data penelitian diolah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 36% pengelola PKBM masuk kateri Cukup untuk kompetensi teknis, 15% masuk kategori Lebih Dari Cukup, 11% katergori Baik, Kurang Sekali dan sangat Kurang Sekali, 6% Sangat Baik Sekali dan 1% Baik Sekali. Kondisi ini tidak lebih baik dari kompetensi personal sosial, bahkan untuk kategori Baik sampai Sangat Baik Sekali hanya berjumlah 18% sedangkan sisanya 82% masuk kategori Lebih Dari Cukup sampai Sangat Kurang Sekali. Artinya kemampuan pengelola dalam merencanakan program PLS, memotivasi kelompok, mengorganisasi program, melaksanakan pembinaan, melaksanakan penilaian, membuat laporan, kewirausahaan dan ketatausahaan masih banyak yang tidak memenuhi syarat sebagai pengelola PKBM atau tidak layak sebagai pengelola, mengingat masih sangat rendahnya prosentase pengelola yang berkategori baik, baik sekali dan sangat baik sekali. Kompetensi teknis sangat vitas sekali dalam pelaksanaan program PLS, karena aspek-aspek manajerial pelaksanaan program ada dalam kompetensi ini, sehingga sangat dimungkinkan program yang dilaksanakan hanya asal jalan saja karena berdasarkan hasil evaluasi kemampuan mereka secara teknis sebagian besar tidak baik.

c. Hasil Evaluasi Kompetensi Akademis

Kompetensi Akademis pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) memiliki pemahaman penguasaan konsep dasar PLS. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std. Dev	3,32		
Mean	27,48		
Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D		33,29
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D		31,63
Baik	Mean + 0,75 S.D		29,97
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D		28,31
Cukup	Mean - 0,25 S.D		26,65
Kurang	Mean - 0,75 S.D		24,99

Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	23,33
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	21,67

Tabel 4.8. Hasil Evaluasi Kompetensi Akademis

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman		1	3	2	8	3	2	6	25
Bantul		1	4	1	6	4			16
Kulon Progo	2	2	2	4	9	2		6	27
Gunung Kidul	4	1	1	1	19			1	27
Kota Yogyakarta			1		4				5
jumlah	6	5	11	8	46	9	2	13	100

Sumber: data penelitian diolah

Berdasarkan pada data di atas, dapat dilihat bahwa kompetensi akademis pengelola dimana indikatornya adalah pemahaman penguasaan konsep dasar PLS sangat buruk, terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 46% pengelola masuk dalam kategori Cukup, 13 % Sangat Kurang Sekali, 9% Kurang, 8% Lebih dari Cukup dan 2% Kurang Sekali, sedangkan sisanya yaitu 11% Baik, 6 % Sangat Baik Sekali dan 5% Baik Sekali.

d. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengembangan Budaya

Kompetensi Pengembangan Budaya pengelola PKBM terdiri dari beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: memahami budaya masyarakat. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std. Dev	1,11
Mean	9,19

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	11,13
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	10,58
Baik	Mean + 0,75 S.D	10,02
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	9,47
Cukup	Mean - 0,25 S.D	8,91

Kurang	Mean - 0,75 S.D	8,36
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	7,80
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	7,25

Hasi perhitungan standar deviasi dan rata-rata skor nilai responden, kemudian dibandingkan dengan skor nilai masing-masing responden berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di Propinsi DIY. Hasil evaluasi ditunjukkan oleh tabel 4.8.

Tabel 4.9. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengembangan Budaya

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman		2		7	10		4	2	25
Bantul		2		3	11				16
Kulon Progo	2	4		1	19			1	27
Gunung Kidul	2	1			19		2	3	27
Kota Yogyakarta					4			1	5
jumlah	4	9	0	11	63	0	6	7	100

Sumber: data penelitian diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kompetensi pengembangan budaya para pengelola PKBM juga masih sangat rendah, terlihat dari 63% pengelola masuk kategori Cukup, 11% Lebih Dari Cukup, 7% Sangat Kurang Sekali dan 6% Kurang Sekali, sedangkan sisanya 9% masuk kategori Baik Sekali dan 4% Sangat Baik Sekali.

e. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM

Kompetensi pengelola PKBM terdiri dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola PKBM yaitu: 1) kompetensi personal sosial, 2) kompetensi teknis, 3) kompetensi akademis, 4) kompetensi pengembangan budaya. Kriteria evaluasi menggunakan 8 (delapan) klasifikasi terdiri dari: Sangat Baik Sekali (SBS), Baik Sekali (BS), Baik (B), Lebih Dari Cukup (LDC), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali (KS), dan Sangat Kurang Sekali (SKS). Setiap komponen kompetensi memiliki kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan data empiris yang di peroleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil analisis evaluasi kompetensi personal sosial sebagai berikut:

Std Dev	15,25
mean	166,13

Sangat Baik Sekali	Mean + 1,75 S.D	192,82
Baik Sekali	Mean + 1,25 S.D	185,19
Baik	Mean + 0,75 S.D	177,57
lebih dari Cukup	Mean + 0,25 S.D	169,94
Cukup	Mean - 0,25 S.D	162,32
Kurang	Mean - 0,75 S.D	154,69
Kurang Sekali	Mean - 1,25 S.D	147,07
Sangat Kurang Sekali	Mean - 1,75 S.D	139,44

Hasil perhitungan standar deviasi dan rata-rata skor nilai responden, kemudian dibandingkan dengan skor nilai masing-masing responden berdasarkan kabupaten dan kota yang ada di Propinsi DIY. Hasil evaluasi ditunjukkan oleh tabel 4.10.

Tabel 4.10. Hasil Evaluasi Kompetensi Pengelola PKBM

Kabupaten	Status Penilaian Kompetensi								Jml
	SBS	BS	B	LDC	C	K	KS	SKS	
Sleman	1		2	5	2	4	1	10	25
Bantul	1		2	7	2	2	2		16
Kulon Progo	1	2	2	6	5	5	2	4	27
Gunung Kidul	2	1	4	5	10	4	1		27
Kota Yogyakarta				1	1	3			5
jumlah	5	3	10	24	20	18	6	14	100

Sumber: data penelitian diolah

Hasil evaluasi terakhir adalah penggabungan dari keempat standar kompetensi seorang pengelola PKBM yang terdiri dari Kompetensi Sosial, Kompetensi Teknis, Kompetensi Akademis, dan Kompetensi Pengembangan Budaya. Dari hasil evaluasi dapat dilihat bahwa sebagian besar pengelola tingkat kompetensinya masih rendah, terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 24% pengelola masuk dalam kategori Lebih Dari Cukup, 20% Cukup, 18% Kurang, 14% Sangat Kurang Sekali dan 6% Kurang Sekali, sedangkan sisanya yaitu 10% masuk kategori Baik, 5% Sangat Baik Sekali dan 3% Baik Sekali.

B. Pembahasan

Dari data-data hasil evaluasi yang telah disajikan di atas dapat dilihat bahwa tingkat kompetensi PKBM yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar masih sangat rendah, perbandingan antara tingkat kompetensi dengan

klasifikasi tinggi (Baik, Baik Sekali dan Sangat Baik Sekali) dan rendah (Kurang, Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali) masih lebih banyak pengelola dengan klasifikasi rendah yaitu 18% : 38%. Namun data yang menunjukkan tingkat kompetensi dengan klasifikasi sedang lebih banyak yaitu 44%. artinya sebagian besar pengelola PKBM di Propinsi DIY kompetensinya Sedang dan tingkat kompetensi pengelola PKBM dengan klasifikasi tinggi sangat sedikit atau rendah.

Banyaknya pengelola PKBM yang masuk dalam klasifikasi sedang (Lebih Dari Cukup dan Cukup) dan rendah (Kurang, Sangat Kurang dan Sangat Kurang Sekali) yaitu sebanyak (76%) pada aspek Kompetensi Personal Sosial, memperlihatkan bahwa selama ini pengelola PKBM dalam mengelola tidak didasarkan pada nilai-nilai hidup, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, mandiri dan jujur. Disamping itu masih banyak pengelola yang tidak menyadari pentingnya menghargai warga belajar dan memahami kondisi mereka baik fisik maupun psikis, ditambah banyaknya pengelola yang masih rendah kemampuannya dalam proses komunikasi dengan masyarakat maupun warga belajar dan juga kerjasama antara sesama pengelola maupun dengan atasan.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi di atas, jumlah pengelola PKBM dengan klasifikasi Sedang (Lebih Dari Cukup dan Cukup) dan Rendah (Kurang, Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali) yaitu mencapai (82%) menggambarkan tingginya jumlah pengelola PKBM yang tidak memahami proses perencanaan program PLS yang meliputi proses identifikasi, analisis kebutuhan prioritas, identifikasi potensi lingkungan, dan lainnya. Masih banyak pengelola PKBM yang tidak memiliki kemampuan dalam memotivasi masyarakat maupun warga belajar yang dapat meningkatkan iklim kerja kondusif. Data di atas juga menunjukkan banyak pengelola PKBM tidak dapat melakukan pembinaan dan tidak mampu melakukan penilaian baik itu rencana penilaian, penyusunan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, maupun menganalisis, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Yang lebih krusial dari kompetensi ini adalah kemampuan pengelola dalam melaksanakan kegiatan administrasi dimana hasil evaluasi menunjukkan banyak pengelola PKBM (82%) belum sesuai dengan harapan dalam memahami maupun melaksanakan tugas administrasi.

Kondisi serupa terjadi pada hasil penilaian kompetensi akademis, dimana kondisi pengelola yang masuk dalam klasifikasi Sedang (Lebih Dari Cukup dan Cukup) dan Rendah (Kurang, Kurang Sekali dan Sangat Kurang Sekali) menunjukkan angka yang tinggi yaitu 78% artinya banyak pengelola PKBM yang tidak memahami program PLS atau hanya cukup paham saja dalam memahami program PLS seperti program kepemudaan, program PAUD, program kemasyarakatan, konsep dasar PLS, konsep pembelajaran orang dewasa, konsep pendidikan seumur hidup, pemahaman tentang satuan-satuan PLS. Semakin banyak pengelola PKBM yang tidak paham substansi kompetensi akademis ini dapat menyebabkan program PLS yang diselenggarakan tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan luar sekolah.

Evaluasi kompetensi pengembangan budaya sangat terkait dengan salah satu unsur masukan dalam pendidikan luar sekolah yaitu masukan lingkungan. Data penelitian menunjukkan bahwa bahwa 89% pengelola PKBM terklasifikasi Sedang dan Rendah dalam kompetensi pengembangan budaya. Namun dari 89% ini 74% diantaranya masuk kategori sedang. Meskipun tidak baik, namun pemahaman mengenai kebudayaan dan adat istiadat di masyarakat sudah cukup memadai dengan kemampuan sedang yang dimiliki oleh pengelola PKBM ini.

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa selama ini tugas pengelola PKBM tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh sebagian besar pengelola karena tingkat kompetensi yang kurang baik. Padahal jika dilihat dari tugasnya, pengelola memiliki tugas yang cukup banyak antara lain: mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dasar, mengadakan konsolidasi program, menyusun program belajar sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat dan membuat peta program di setiap desa, menyusun rencana kerja mingguan, bulanan, tengah tahunan dan tahunan, menyiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan program, mencarikan dan menyiapkan kebutuhan buku, alat, tenaga / lembaga yang diperlukan dalam pelaksanaan program, mencatat kemajuan belajar warga belajar, mengamati dan mencatat pelaksanaan program belajar mengajar, mengawasi dan mengendalikan semua pelaksanaan program belajar, menyusun laporan bulanan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan, memberikan saran-saran perbaikan program atau

mengembangkan program belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan situasi daerah, memilih dan menentukan calon warga belajar untuk setiap jenis program belajar (Paket A, Paket B, Paket C, Kejar Usaha, Beasiswa, Magang, Kursus Diklusemas, dll), mengadakan rintisan program yang inovatif sesuai dengan potensi, kondisi dan situasi lingkungan sekitar, mengembangkan jaringan kerja, baik dengan dinas / instansi terkait, dunia usaha dan lembaga keuangan, mengembangkan usaha produktif sesuai dengan permintaan pasar.

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kompetensi pengelola PKBM adalah karena tingkat pendidikan yang cukup bervariasi, dimana dari 100 responden, yang berpendidikan S1 berjumlah 49% dan S2 sebanyak 5%, jumlah ini pun tidak menggambarkan keahlian ke PLS an berdasarkan latar belakang pendidikan mereka, karena sebagian besar adalah sarjana non pendidikan luar sekolah, sehingga sangat wajar jika kompetensi mereka rendah, selain mereka yang berpendidikan S1 dan S2, 45% diantara mereka pendidikannya sangat bervariasi mulai dari lulusan SLTP, SMA, SMK, SPG, D2 dan bahkan D3 yang tentu saja relevansi keilmuan tentang ke PLS an sangat rendah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tidak dapat memberikan informasi yang cukup komprehensif (menyeluruh) mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat kompetensi pengelola PKBM ini. Disamping itu informasi mengenai kesenjangan kompetensi tidak dapat diakses karena keterbatasan metode penelitian yang dilakukan. Sehingga dikemudian hari sangat diperlukan penelitian lanjutan yang dapat mengakomodasi penilaian kebutuhan (*need assessment*) untuk peningkatan kompetensi PKBM dengan metode yang lebih sesuai dan mendalam dengan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh bisa lebih memberikan informasi yang berarti untuk pihak yang berkepentingan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Didasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian mengenai tingkat kompetensi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi pengelola PKBM di Propinsi DIY saat ini sebagian besar masuk dalam klasifikasi sedang yaitu 44%, yang masuk klasifikasi rendah sebesar 38% dan yang masuk klasifikasi tinggi sebanyak 18%. Artinya tingkat kompetensi pengelola PKBM yang terklasifikasi tinggi masih sangat rendah sekali.

B. Saran

Dari simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten perlu memperhatikan keberlangsungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan meningkatkan kompetensi para pengelolanya.
2. Melaksanakan pendidikan baik itu formal maupun non formal bagi para pengelola PKBM untuk meningkatkan kompetensi manajerial dalam mengelola PKBM dan meningkatkan kualifikasi akdemisnya sehingga sesuai dengan kriteria sebagai tenaga kependidikan non formal yang profesional sesuai dipersyaratkan oleh Undang-undang.

Daftar Pustaka

- Arikunto. Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi revisi II, Rineka Cipta, Jakarta.
- BPKB Jawa Timur, 2000, *Modul Pendampingan*, Depdiknas, BPKB Propinsi Jawa Timur, Surabaya.
- BPPLSP, 2004, *Paket Pelatihan Pengelola PKBM Berbasis Kompetensi 2004*, Depdiknas, Dirjen PLSP, BPPLSP Regional III Jawa Tengah.
- Cooper, D.R., & Schindler, P.S., 2003, *Business Research Methods*, 8th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc, New York.
- Direktorat Dikmas, 1998, Dirjen Diklusepora Depdikbud, *Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat*, Jakarta.
- Fatah, N., 2000, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Hersey, P & Blanchard, K.H., 1982, *Management of Organizational Behavior Utilizing Human Resources (4th Ed)*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffts, New Jersey.
- Husein Umar, 1999, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sihombing, Umberto, 1999, *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Datang*, Jakarta.
- Sudjana, 2000, *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Falah Production, Bandung.
- _____, 2003, *PKBM dalam Memberdayakan Masyarakat*, Visi Dirjen PLSP, Jakarta.
- _____, 2004, *Pendidikan Non Formal, Wawasan Sejarah Perkembangan Filafat Teori Pendukung Asas*, Falah Production, Bandung.

LAMPIRAN